



**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 836/X/2014

II/OKTOBER 2014



## Pencalonan Presiden IPU Strategis

# Pencalonan Presiden IPU Strategis

Pencalonan anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf sebagai Presiden IPU (*Inter-Parliamentary Union*) dinilai sangat strategis. Bukan saja bagi DPR dan Bangsa Indonesia tetapi juga bagi IPU karena kandidat berasal dari negara demokrasi terbesar ketiga serta politisi perempuan dari negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

Perserikatan Parlemen se-Dunia atau IPU yang lahir lebih awal dibanding organisasi serupa milik pemerintah/eksekutif PBB dalam kiprahnya telah melahirkan sejumlah resolusi. Keberadaan anggota DPR sebagai presiden di organisasi itu dinilai akan baik bagi agenda pembangunan nasional ke depan.

“Saya sudah pelajari riwayat hidup, belum tentu di Indonesia dapat dua orang seperti beliau. Pengalamannya tidak diragukan lagi, bisa kita andalkan buat kepentingan negara dan bangsa. Kita doakan Bu Nur bisa terpilih dan sukses,” kata Ketua DPR Setya Novanto dalam konferensi pers di Ruang Wartawan, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/10/14).

Pengalaman sebagai Presiden Parlemen Perempuan dan Anggota *Executive Committee* IPU dua periode berturut-turut serta organisasi parlemen lain baik regional maupun internasional menurutnya akan sangat membantu. Politisi FPG ini mengaku sudah bicara dengan Menteri Luar Negeri agar mendukung proses pencalonan ini, lewat Duta Besar RI yang dapat mengkomunikasikannya kepada negara lain.

Bicara pada kesempatan yang sama anggota BKSAP Tantowi Yahya menyebut doa restu dari seluruh rakyat Indonesia tentu akan sangat membantu lancarnya proses pemilihan tanggal 16 Oktober nanti di Jenewa, Swiss. “Semakin



Ketua DPR RI Setya Novanto didampingi Anggota DPR Nurhayati Ali Assegaf dan Tantowi Yahya saat memberikan keterangan Pers

banyak yang mendoakan semakin makbul, ini prestasi besar bukan saja bagi DPR tapi juga bangsa Indonesia,” tekannya.

Sementara itu Nurhayati Ali Assegaf menyatakan akan mengusung isu demokrasi inklusif, memperbaharui komitmen parlemen untuk terlibat dengan publik yang lebih luas, termasuk dengan pemerintah dan PBB. “Salah satu yang membuat saya harus berjuang optimal adalah karena dalam persidangan yang tertulis di meja bukan nama saya tetapi Indonesia,” kata dia. (iky) foto: rizka/parle/iw

# Nurhayati Minta Restu Rakyat Indonesia

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf akan mengemban misi penting mewakili Indonesia sebagai kandidat Presiden Perserikatan Parlemen Dunia (IPU). Politisi yang pernah menjabat sebagai Presiden Parlemen Perempuan ini berharap dukungan dari masyarakat agar seluruh proses berjalan lancar.

“Saya mohon doa restu dari masyarakat Indonesia, mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Niat ini tidak akan berhasil tanpa kehendak Allah dan doa dari rakyat Indonesia,” kata Nurhayati saat menjadi pembicara dalam dialog radio Bersama Wakil Rakyat di Pro3RRI Jakarta, Jumat (3/10/14).

Ia menyebut perjuangannya sebagai kandidat Presiden IPU sudah pernah dihadapinya pada tahun 2011. Pada waktu itu ia hanya kalah 7 suara dari kandidat dari Maroko yang memperoleh 137. Dengan persiapan yang lebih baik Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap hasilnya juga akan lebih baik.

“Kali ini saya dicalonkan secara resmi oleh DPR, mendapat dukungan penuh dari Kementerian Luar Negeri. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungannya dan kita terus melakukan lobi dengan jaringan yang sudah terbentuk pada saat 4 tahun menjadi Presiden Parlemen Dunia - IPU,” tuturnya.

Sebagai kandidat ia menyadari langkah mencalonkan diri ini juga membawa nama Indonesia terutama di organisasi IPU (*Inter Parliamentary Union*) yang beranggotakan parlemen dari 165 negara. Tidak seperti organisasi parlemen lain yang ketuanya dijabat secara bergilir, perserikatan parlemen dunia yang usianya lebih tua dari PBB ini menetapkan presidennya melalui pemilihan langsung.

Baginya keberhasilan dalam hajatan yang akan dilaksanakan di Jenewa, Swiss 12-16 Oktober merupakan keberhasilan bangsa. Pesan penting lain adalah upaya DPR untuk membangun



Anggota DPR Nurhayati Ali Assegaf

diplomasi P to P atau parlemen dengan parlemen.

“DPR lewat BKSAP telah berbuat membangun diplomasi lewat parlemen negara lain yang tentu pada akhirnya akan dapat mendukung kinerja pemerintah. Jadi iya DPR kita sudah mendunia, bukan jago kandang lah,” ujar dia.

Dalam dialog tersebut sejumlah pendengar menyampaikan apresiasi diantaranya Anis dari Bekasi dan Edi dari Riau yang mengaku bangga dengan pencalonan tersebut. “Saya prihatin melihat paripurna DPR yang kemaren ribut tapi terus terang saya bangga dengan Ibu Nur doa kami semoga lancar ya disana,” kata Anis. (iky) foto: iwan armanias/parle/iw

## DPR Nilai Positif Pembangunan *Giant Sea Wall*

Anggota DPR RI, Teguh Juwarno menilai positif pembangunan tanggul laut raksasa (*Giant Sea Wall*) atau *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD). Hal tersebut diungkapkannya se usai Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (9/10).

“Pembangunan tanggul laut raksasa bisa menjadi penahan air pasang yang berdampak pada ketinggian air di Jakarta. Kita tahu selama ini air dari atas (Bogor) membanjiri Jakarta sudah tidak lima tahunan lagi, nyaris setiap tahun daerah

di Jakarta selalu banjir. Oleh karena itu pembangunan tanggul laut atau *Giant Sea Wall* di Teluk Jakarta itu sangat baik untuk mengantisipasi terjadinya banjir,” papar Teguh Juwarno.

Hal tersebut ditambahkan Politisi dari Fraksi PAN ini sebagaimana yang sudah dilakukan kota Amsterdam beberapa tahun silam. Selain itu menurutnya, proyek ini bermanfaat untuk penyediaan cadangan air baku. Serta yang tak kalah



Anggota DPR Teguh Juwarno

pentingnya adalah penyediaan lahan untuk kepentingan bisnis. Karena sebagaimana diketahui dalam proyek ini juga akan ada pembangunan daerah baru atau pulau buatan.

Melihat manfaat yang sangat besar dari proyek tersebut, Teguh meyakini bahwa parlemen akan terus mendorong terselesainya proyek tersebut. Meski proyek itu akan memakan waktu yang tidak sebentar.

“Untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas seperti pelaksanaan proyek *Giant Sea Wall* tersebut, saya berharap tidak ada lagi tarik menarik kebijakan disini. Dan saya bersama

teman-teman di DPR akan terus mendukung program baik tersebut,” tegas mantan presenter televisi ini.

Sebagaimana diketahui, hari ini 9 Oktober 2014, pemerintah memulai pembangunan proyek tanggul Garuda Raksasa atau *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD). Dengan Tahap pertama berupa pembangunan bendungan sepanjang 8 km di Teluk Jakarta. Proyek ini akan melibatkan tiga provinsi, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Direncanakan proyek ini akan memakan waktu selama tiga tahun.

(Ayu) foto: andri/parle/iw

## Perppu Pilkada Sudah Diterima DPR

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, Perppu Pilkada sudah diterima DPR dan sudah diteruskan ke Badan Legislasi (Baleg) untuk dipelajari dan dibahas pada sidang DPR berikutnya. Hal itu dikatakannya kepada pers Kamis (9/10) sebelum Sidang Paripurna DPR yang beragendakan penetapan dan pengesahan fraksi-fraksi DPR.

Dalam Sidang tersebut Ketua DPR mengumumkan masuknya dua surat dari Presiden. Surat pertama dari presiden RI no.R56/pres/x/2014 tertanggal 2 Oktober 2014 perihal RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU.

Surat presiden kedua bernomor.R57/pres/x/2014 tertanggal 2 oktober 2014 perihal RUU Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no.2/2014 tentang Perubahan atas UU no.23/2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang. Selanjutnya menurut tatib DPR, surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Perppu Pilkada dikeluarkan Presiden menyusul aksi penolakan terhadap disahkannya RUU Pilkada yang mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Sementara Perppu Pilkada membatalkan UU Pilkada sehingga pemilihan kepala daerah dilakukan lagi oleh rakyat secara langsung.

(mp,mh) /foto:iwan armanias/parle/iw.



Ketua DPR RI Setya Novanto

## Pembahasan RUU Akan Lebih Selektif

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, usulan perlunya melakukan amandemen terhadap 122 UU merupakan masukan yang sangat bagus. Usul-

an itu akan diteliti dan dikaji dengan mengundang Baleg untuk sinkronisasi, kordinasi dan pembahasan lebih lanjut. Ada beberapa UU yang harus disesuaikan

kan dan ada sejumlah RUU yang tertunda dan perlu diselesaikan.

“Ke depan pembahasan RUU akan



Ketua DPR Setya Novanto saat diwawancara wartawan

dilakukan lebih selektif, misalnya setahun menghasilkan 20-30 UU, sudah luar biasa,” ungkap Ketua DPR menjawab pers sebelum memimpin Sidang Paripurna Kamis (9/10) di Jakarta. Dengan amandemen beberapa UU tersebut dia berharap ada hasil yang baik dan akurat yang melibatkan pihak terkait

termasuk pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain.

Menurutnya, banyak UU yang dihasilkan, tetapi saat ada gugatan uji materi MK, akhirnya RUU dibatalkan. Karena itulah perlu seteliti mungkin dalam pengajuan RUU dan semuanya

melalui pembahasan dan melibatkan unsur yang kuat. Ia mengakui memang masukan banyak, sehingga akan diteliti lebih lanjut.

Sementara itu anggota FPG Tantowi Yahya mengatakan dalam prolegnas 2014-2019 pihaknya akan mengajukan usulan amandemen atas 122 UU. Kalau pemerintah prorakyat akan mendukung dan sepatutnya dengan Program KMP. Misalnya UU Pertambangan, UU Perbankan, mana ada negara di mana asing menguasai bank sampai ke desa-desa. Coba investasi di Malaysia, tidak bisa. Artis Indonesia untuk tampil di Malaysia persyaratannya luar biasa, berlapis-lapis, nafasnya tidak diperbolehkan tampil di sana.

Berbeda dengan artis asing ke Indonesia, disediakan karpet merah. Tidak ada pembatasan, boleh tampil dimana saja. “Ini kan terlalu liberal, ini harus kita revisi,” katanya. Kalau pemerintah semangatnya berpihak pada rakyat, maka tidak alasan untuk tidak sepatutnya dengan rencana revisi UU tersebut. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Paripurna Sahkan Sepuluh Fraksi DPR

Rapat Paripurna DPR ketiga yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Setya Novanto, Kamis (9/10) menetapkan dan mengesahkan 10 Fraksi DPR. Sebelumnya telah disahkan 7 fraksi dan rapat kali ini mendengarkan wakil dari tiga Fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Ketua DPR yang didampingi Wakil Ketua Fadli Zon dan Agus Hermanto, membacakan susunan Fraksi-fraksi DPR periode 2014-2019. Kesepuluh Fraksi tersebut adalah, Fraksi PDI Perjuangan dengan anggota 106 orang anggota, Fraksi Partai Golkar beranggotakan 90 orang, Fraksi Partai Gerindra 73 orang, Fraksi Partai Demokrat dengan anggota 60 orang, dan fraksi Partai Amanat Nasional 48 orang.

Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 47 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 40 orang, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 39 orang, Fraksi Nasional Demokrat 36 orang dan Fraksi Partai Hanura 16 orang. Kemudian Pimpinan rapat menanyakan apakah susunan Fraksi tersebut dapat disetujui? “Setuju...”, serempak peserta rapat menyatakan persetujuannya, sehingga telah sah dan resmi komposisi fraksi-fraksi DPR periode 2014-2019. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.



Saleh Husin Fraksi Partai Hanura membacakan komposisi fraksinya di DPR RI

## Nico Siahaan Konsen Masalah Pendidikan dan Ekonomi Kreatif

Anggota DPR Nico Siahaan mengaku konsen di Komisi X utamanya masalah pendidikan. Namun apakah komisi-komisi di DPR akan tetap 11 seperti periode lalu atau ada perubahan. “Yang pasti perhatian saya kepada masalah pendidikan karena saat bekerja di stasiun TV, saya juga seorang pengajar,” ujarnya saat berbincang dengan Parle sebelum menghadiri Rapat Paripurna DPR Kamis (9/10).

Mantan presenter TV ini bertekad memajukan pendidikan di Indonesia, dan akan mengupayakan sebuah perencanaan yang baik bagi dunia pendidikan di Indonesia untuk 20-30 tahun ke depan. Selama ini kata Nico, kita belum memiliki dan setiap ganti menteri ganti kebijakan. Kebijakan selalu berganti, seharusnya buat UU Sisdiknas yang mengatur kurikulum targetnya ditentukan sekian tahun.

Selain masalah pendidikan, politisi PDI Perjuangan ini menyatakan tertarik pada masalah ekonomi kreatif. Pasalnya selama 20 tahun lebih berkecimpung dalam masalah tersebut dan mengaku bisa memberi masukan termasuk rumusan RUU Ekonomi Kreatif. Sebagaimana dikampanyekan Jokowi, potensi ekonomi kreatif masih potensial untuk digali dan dikembangkan



Anggota DPR Nico Siahaan

sekaligus dapat menyalurkan tenaga kerja.

Di beberapa kota di Indonesia, kata Nico sudah mengembangkan potensi ekonomi kreatifnya. Seperti Bandung sebagai daerah pemilihan (Dapilnya) yang sudah mengembangkan ekonomi kreatif, sehingga cocok dan akan diperjuangkan di lembaga legislatif.

Menanggapi pemilihan pimpinan DPR yang lalu, ia mengakui itu adalah dinamika politik, dan bertekad akan

menjadi penyeimbang terhadap pemerintah (*check and balances*). Karena kita yakin, Jokowi dari mulai Walikota Solo dan Gubernur DKI, programnya baik. “Saya nggak yakin, kalau DPR sekarang akan menjegal pemerintah,” katanya dengan menambahkan, selama program pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, tidak ada partai yang berani berhadapan. Karena konstituen akan menyampaikan langsung kepada wakil-wakilnya.

“Saya optimis Koalisi Merah Putih (KMP) akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK. Pertama pemerintahan Presidensial, dimana pembuatan UU oleh Pemerintah dan DPR. Dari sisi anggaran, nanti akan jatuh ke dapil masing-masing,” katanya

Karena itu, walaupun nanti Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak mendapatkan jatah Pimpinan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tidak ada masalah. “Kita mau kerja. Dapat ketua atau tidak, tidak masalah. Malah kadang-kadang ketua kerjanya berat. Apalagi pemerintahan nanti adalah partai kita, koalisi kita, sehingga hubungan dengan mitra kerja akan lebih baik,” pungkas Nico Siahaan. (mp)/foto: iwan armanias/parle/iw.

## Calon Ketua MPR Sampaikan Visi Misi



Suasana Sidang Paripurna Pemilihan Ketua MPR

Inilah pertama kalinya 2 kandidat Ketua MPR RI yang diusung melalui Paket A dan Paket B menyampaikan visi misinya bila terpilih menjadi Ketua MPR RI periode 2014-2019. Paket A diketuai Oesman Sapta Odang dan Paket B diketuai Zulkifli Hasan.

Seperti diketahui, Rabu dini hari (8/10) Rapat Paripurna MPR menetapkan dua paket Pimpinan MPR untuk dipilih dengan cara pemungutan suara tertutup. Sebelum dilakukan pemungutan suara, masing-masing kandidat Ketua MPR diberi waktu 5 menit oleh Pimpinan Rapat untuk menyampaikan visi misinya bila terpilih.

Oesman Sapta tampil pertama menyampaikan visi misi singkatnya. Ia menegaskan akan menjadi perekat yang kuat antara DPR dan Kelompok DPD di MPR. Proses pemilihan

ini, menurutnya, bukan sebagai ajang mencari kekuasaan. Baru kali ini DPR mengusulkan anggota DPD sebagai Ketua MPR RI. Tentu ini perlu diapresiasi. Harapannya, kelak MPR mendapat tempat yang baik di mata rakyat Indonesia.

Sementara itu, Zulkifli Hasan menyampaikan, pihaknya tidak pernah mengejar jabatan ketua MPR. Mantan Menteri Kehutanan ini juga mengaku tak berencana menjadi ketua MPR. “Tapi garis tangan meminta saya hingga ke sini. Tugas

ini saya akan kerjakan dengan semaksimal mungkin,” katanya saat menyampaikan visi misi di hadapan para anggota MPR.

MPR, lanjut kader PAN itu, harus terus mengawal pelaksanaan 4 pilar, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Suara Kelompok DPD yang selama ini tidak terdengar di MPR harus diperkuat. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Pemilihan Pimpinan MPR Berjalan Lancar



Pimpinan MPR sementara Maimanah Umar

Secara keseluruhan pemilihan Pimpinan MPR RI relatif berjalan lancar. Tak ada aksi walk out seperti dalam pemilihan Pimpinan DPR RI. Walau masih diwarnai banyak interupsi, namun tidak sampai menunda agenda utamanya, pemilihan Pimpinan MPR periode 2014-2019.

Agenda Rapat Paripurna MPR, Rabu dini hari (8/10), diawali pembacaan nama-nama calon Pimpinan MPR yang mengisi paket formasi pimpinan dari setiap fraksi dan kelompok DPD. 5 fraksi yang terdiri dari F-PG, F-Gerindra, F-PKS, F-Demokrat, dan F-PAN mengusulkan paket nama yang terdiri dari Zulkifli Hasan (F-PAN) sebagai calon Ketua

MPR dan Mahyudin (F-PG), EE Mangindaan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), serta Oesman Sapta Odang (DPD) masing-masing sebagai calon wakil ketua.

Sementara 5 fraksi dan 1 kelompok DPD mengusulkan formasi Oesman Sapta Odang (DPD) sebagai calon ketua. Bersama Oesman Sapta diusulkan para wakilnya, yaitu Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Imam Nahrawi (F-PKB), Hazrul Azwar (F-PPP), dan Patrice Rio Capella (F-Nasdem). Pimpinan rapat kemudian menamai Paket A untuk paket yang mencalonkan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua MPR dan Paket B yang mencalonkan Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR.

Tidak seperti fraksi-fraksi di MPR, Kelompok DPD tidak membacakan formasi nama-nama calon Pimpinan MPR yang diusulkannya. DPD hanya mengusulkan satu nama Oesman Sapta Odang sebagai calon Pimpinan MPR. Ini dimaklumi, lantaran dua kelompok besar di MPR memasukkan nama Oesman Sapta dalam formasi paket A maupun paket B.

Namun secara tersirat Kelompok DPD sangat mengapresiasi usulan dari kalangan fraksi di MPR yang menempatkan anggota DPD menjadi calon Ketua MPR RI. Selama ini, Kelompok DPD merasa seperti kehilangan perannya di parlemen. Dengan menempatkan orang DPD di kursi calon Ketua MPR, maka merupakan penghargaan dan pengakuan yang perlu diapresiasi tinggi. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Sekjen DPR Lantik 5 Pejabat

Mengikuti dinamika DPR yang sangat cepat, Kesetjenan DPR sebagai supporting system pun berkewajiban untuk mengikuti irama dan gerak kedewanan termasuk pimpinan. Atas dasar itulah maka Rabu (8/10) pagi Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti melantik satu pejabat eselon II dan empat pejabat eselon III dalam struktur Kesetjenan.

Lima pejabat Setjen DPR yang dilantik adalah M. Dimiyati Sudja' yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian

Perumahan dan Wisma DPR diangkat menjadi Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi. Rini Koentarti yang semula menjabat sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga (Kabagset BURT) dilantik menjadi Kepala Bagian Perumahan dan Wisma, sementara jabatan KabagsetBURT dijabat oleh Riyadi Santoso. Hani Yuliasih yang semula menjabat Kepala Bagian Sekretariat Komisi II, kini menduduki jabatan Kepala Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan. Sedangkan Suhastri

Rejeki menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Wakil Ketua Bidang Kesra.

“Perubahan harus dilakukan untuk menyesuaikan tuntutan pekerjaan. Sebagaimana diketahui Pimpinan DPR telah terbentuk minggu lalu, oleh-arenanya sebagai supporting system Setjen DPR harus menyesuaikan dengan dinamika DPR yang sangat cepat tersebut. Atas dasar itulah diperlukan sebuah perubahan, pergantian dan pengangkatan di tubuh Kesetjenan,” jelas Sekjen DPR RI, Winantuningtyas-



Suasana Pelantikan 5 Pejabat Setjen

titi.

Ditambahkan Win, begitu Sekjen DPR biasa disapa, ada kriteria tersendiri yang digunakan untuk melakukan perubahan tersebut, yakni perpaduan antara merit system dan pola karir. Dimana merit system berdasarkan kapasitas seseorang yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, sementara pola karir adalah berdasarkan senioritas atau jenjang karir orang tersebut.

“Pengangkatan dan mutasi jabatan ini berdasarkan perpaduan antara senioritas tetapi tanpa mengabaikan kapasitas yang dimiliki. Jadi betul-betul dilakukan berdasarkan penilaian kinerja dan assesment yang dilakukan oleh pihak ketiga,” ungkap Win. (Ayu)/ foto:andri/parle/iw.

## JKN Akan Berganti Nama KIS

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning meyakini tidak akan ada yang berubah dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), kemungkinan kartunya saja yang akan berubah nama, tidak lagi JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional, melainkan KIS atau Kartu Indonesia Sehat.

“BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial itu kan ada undang-undangnya, jadi tidak akan ada yang berubah dari badan tersebut. Kalau mau merubah berarti harus mengamandemen undang-undang, dan itu tidak mungkin. Namun kemungkinan besar di pemerintahan Pak Jokowi nanti nama kartu JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional yang akan berubah menjadi KIS atau Kartu Indonesia Se-



Anggota DPR Ribka Tjiptaning

hat sebagaimana yang kerap digaungkan Pak Jokowi saat kampanye lalu. Tapi itu hanya masalah teknis saja,” jelas Mantan Ketua Komisi IX DPR RI,

Ribka Tjiptaning.

Yang jelas, ditambahkan Ribka, masyarakat tidak perlu khawatir bahwa JKN yang ada dalam BPJS yang sudah berjalan itu akan berubah atau malah dihapus, mengingat tidak sedikit masyarakat yang sudah terlanjur membuat Kartu Jaminan Kesehatan Nasional tersebut dengan membayar sejumlah premi setiap bulannya.

“Intinya, di pemerintahan Pak Jokowi nanti tidak boleh satu orang pun yang tidak terlayani dalam mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Jadi kami menjamin tidak ada yang berubah dari program tersebut, termasuk BPJS nya, tapi kami akan terus memperbaikinya,”aku Ribka. (Ayu)/ foto: rizka/parle/iw.

## Rasio Polisi di Lampung Harus Ditingkatkan

Kapolri perlu memberikan perhatian pada persoalan masih rendahnya jumlah anggota kepolisian di Provinsi Lampung. Wilayah yang menjadi perlintasan utama keluar masuk Jawa-Sumatera ini memiliki penduduk 8,7 juta jiwa sementara jumlah personil Polda Lampung hanya 9500 orang.

“Berarti rasio personil kepolisian dengan jumlah penduduk Lampung 1 : 761 jauh dibawah rata-rata nasional 1 : 564 orang. Itulah sebabnya kami mengusulkan Kapolri perlu menambah personilnya di Lampung,” kata anggota Fraksi PKS DPR RI Al Muzammil Yusuf dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (7/10/14).



la menambahkan kajian sejumlah sosiolog dan kriminolog menunjukkan tindak kejahatan di Provinsi Lampung memiliki akar sejarah tersendiri sehingga tidak mudah untuk dihilangkan. Aksi pelaku kriminal ini juga beragam dan dilakukan oleh jaringan terorganisir terlihat dari data yang dimiliki kepolisian.

“Hasil penelitian Mabes Polri telah terjadi sekitar 1.700 kasus pencurian dan kekerasan di Lampung selama kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk mengatasi itu saya pernah meminta Mabes Polri menambah personil Brimobnya dan meningkatkan grade Polda dari B menjadi A,” tuturnya.

Salah satu kasus yang membuatnya prihatin adalah terbunuhnya guru SDIT Permata Bunda oleh kawanannya di Kalianda, Kabupaten Tanggamus baru-baru ini. Wakil rakyat yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi III ini menyebut kasus ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kami turut berduka dan prihatin atas kejadian ini. Polri perlu memberikan perhatian apabila tidak ditangani saya khawatir sejumlah kasus kriminal ini akan merusak citra Lampung,” tandasnya. *(iky)/foto:naefurodji/parle/iw.*



Anggota F-PKS Al Muzammil Yusuf

## Anggaran TNI Harus Ditambah



Anggota DPR Nasir Djamil

Sumber Daya Manusia (SDM) di tubuh TNI sudah sangat mumpuni, meski demikian harus didukung peralatan yang canggih. Oleh karenanya anggaran untuk TNI pun ke depan harus ditingkatkan. Hal tersebut diungkapkan anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil sebelum mengikuti Sidang Paripurna MPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (7/10).

“Jika dilihat alutsista yang dimiliki TNI memang sudah modern, tetapi jika dibanding negara lain, Singapura misalnya, apa yang dimiliki oleh TNI masih kurang modern,” ungkap Nasir Djamil.

Kurang modern alutsista itu terutama yang berada di laut, kapal-kapal Indonesia belum mampu menjaga perairan kita. Hal ini terlihat dengan masih banyaknya perompak-perompak di laut, peredaran narkoba melalui jalur perairan, selain itu peralatan laut kita juga dinilai Nasir belum mampu mengejar orang-orang yang sudah menguasai isi laut Indonesia.

Politisi dari Dapil Nanggroe Aceh Darussalam ini menyadari bahwa kekurangan modern-an alutsista yang dimiliki oleh Indonesia itu sedikit banyak disebabkan oleh anggaran yang masih minim yang dimiliki oleh TNI.

Dikatakannya, anggaran TNI saat ini sekitar 36-37 Triliun untuk Angkatan Darat, Udara, dan Laut. Kondisi demikian dinilai Nasir memang kurang mendukung untuk tersedianya peralatan sistem pertahanan yang sangat modern. Meski begitu, pihaknya sangat bangga dengan SDM yang dimiliki oleh TNI. Namun, SDM tanpa didukung oleh peralatan pertahanan yang canggih juga akan percuma.

Oleh karenanya, di peringatan hari jadi TNI ke-69 ini Nasir mengatakan untuk meningkatkan profesionalisme di tubuh TNI ke depannya, harus juga di dukung oleh peningkatan anggaran selain tentunya peningkatan dalam SDM TNI itu sendiri. *(Ayu) foto:ry/parle/iw*

# Warna-warni

Pemilihan Pimpinan MPR RI  
Periode 2014-2019





# Setjen DPR Gelar Diskusi Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan menjadi tema utama dalam diskusi yang digelar oleh Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Sekretariat Jenderal DPR RI. Diskusi menghadirkan pakar di bidang pangan, yakni Bustanul Arifin. Diskusi berlangsung di ruang rapat BAKN DPR, Gedung Nusantara II, Rabu (8/10).

Dalam paparannya, Arifin menjelaskan berbagai kondisi teranyar pangan Indonesia. Yaitu kemandirian pangan, kedaulatan pangan, termasuk ketahanan pangan yang akan menjadi jargon baru pada pemerintahan mendatang. Namun ketiganya memiliki konsep yang berbeda, karena memang beda landasannya.

“Ketahanan pangan itu konsep ekonomi, karena ukurannya sudah jelas. Ada ukuran ketersediaan, ukuran aksesibilitas, ukuran stabilitas harga sampai dengan keamanan pangan. Kalau kemandirian pangan, lebih pada konsep ekonomi politik. Karena menyangkut kemampuan negara dan bangsa untuk memproduksi kebutuhan pangannya. Sedangkan soal kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri,” jelas Arifin saat ditemui usai acara.

Yang terjadi di masyarakat saat ini, masih dipertentangkan soal ketahanan pangan dengan kedaulatan pangan. Walaupun menjadi pertentangan, akhirnya menggunakan ketiga istilah itu. Dari situ, dirumuskan berbagai rencana strategis mengenai pangan.

“Ke dapannya, soal pangan ini menjadi kompleks, karena bukan hanya masalah *supply* dan *demand* saja, tetapi dengan majunya bangsa dan tekanan jumlah penduduk yang semakin meningkat, beda dimensinya. Pendapatan petani yang cuma Rp 1 juta per bulan, angka ini masih jauh dari UMR. Pendapatan ini juga menjadi masalah, karena bisa berimbas kepada alih profesi,” imbuh Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian UNILA ini.



Suasana diskusi yang digelar Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN

Terkait dengan kebijakan di bidang pangan, Arifin menjelaskan, yang perlu digalakkan oleh DPR adalah pengawasan terhadap program yang sudah menggunakan anggaran negara. Mengingat, sebagian APBN juga dikonsentrasi terhadap anggaran pangan.

“Kalau bicara anggaran, tidak akan ada batasnya. Tapi sekarang, bagaimana dengan anggaran yang ada, itu bisa efektif dan mendapatkan *outcome* yang baik. Kalau tujuannya tercapai target swasembada lima komoditas, itu berarti harus diawasi. Pengawasan harus diperketat,” tambah Arifin.

Ditemui di sela-sela acara, Kepala Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN Setyanta Nugraha menyatakan, tema ini diambil karena isu pangan cukup hangat saat ini. Ia mengaku, ide ini diambil karena belum lama ini pihaknya mendapatkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa sebanyak 29 komoditas pangan adalah impor.

“Kami sangat kaget. Negara kita yang kaya raya, *gemah ripah loh jinawi*, tetapi untuk masalah pangan yang sesungguhnya dapat tumbuh di bumi Indonesia, ini malah impor. Kita ingin menggali apa yang menjadi problem dari kondisi pangan. Termasuk beras, jagung, dan beberapa komoditas lainnya, ini masih impor,” tambah Totok, panggilan akrab Setyanta.

Totok mengaku, diskusi dengan pakar ini digelar secara rutin. Setidaknya dalam setahun, diadakan diskusi hingga lima kali. Tema diskusi disesuaikan dengan isu-isu terbaru.

“Diskusi ini untuk memperkuat kapasitas SDM, yaitu para analis di Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN. Dengan begitu dukungan keahlian yang disampaikan kepada anggota dewan, khususnya di Badan Anggaran maupun komisi terkait dapat meningkat. Bisa dikatakan juga, diskusi dengan pakar ini akan mempertajam hasil analisa,” imbuh Totok. (sf)/foto:andri/parle/iw.



# TB Hasanuddin Kecewa KMP Minta Perubahan UU MD3 dan Tatib



Anggota F-PDI Perjuangan TB Hasanuddin

Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR RI, TB Hasanuddin menyatakan kecewa ketika fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) meminta perubahan UU MD3 dan Tatib MPR menyangkut formasi Pimpinan MPR RI.

Perubahan tersebut tentu makan waktu yang cukup lama, sementara tidak lama lagi MPR harus melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Padahal dalam hasil rapat sebelumnya, sudah disepakati formasi pimpinan MPR hanya menempatkan 1 orang calon dari DPD sesuai ketentuan UU MD3 dan Tatib MPR.

Menurut keterangan TB Hasanuddin usai rapat gabungan MPR, Selasa malam (7/10), sempat terjadi perdebatan soal komposisi pimpinan MPR. Pihaknya kecewa pada Aziz

Syamsuddin dari F-PG yang mengusulkan agar ketua MPR diberikan kepada DPD, sementara para wakilnya sebanyak 4 orang ditentukan dari urutan pemenang Pemilu 2014.

Jadi, lanjut TB Hasanuddin, hasil rapat koordinasi sehari sebelumnya dibatalkan kembali di rapat gabungan ini. Akhirnya hasil rapat Senin (6/10) mentah kembali dan belum ada titik temu hingga rapat gabungan diskors sekitar pukul 19.00 WIB, Selasa malam. Mestinya hari Selasa ini sudah tuntas pemilihan pimpinan MPR RI, tapi karena ada usulan perubahan UU MD3 dan Tatib MPR, pemilihan pimpinan MPR diperkirakan belum bisa dilakukan dalam 1-3 hari ke depan.

“Ketika hasil koordinasi yang sudah diketok itu dibatalkan lagi. Pihak koalisi Prabowo meminta merubah MD3 dan Tatib. Bahkan, saudara Aziz Syamsuddin meminta kepada saya bagaimana kalau kita cari jalan keluar. Jalan keluarnya saya tanyakan seperti apa. Menurut beliau, ketuanya dari DPD, wakilnya dari pemenang terbanyak kesatu, kedua, ketiga, dari hasil Pemilu. Ini sudah tipu menipu,” kelakarnya kepada pers usai mengikuti rapat gabungan.

Mantan Sekretaris Militer Kepresidenan ini sangat kecewa, karena jadwal pemilihan pimpinan MPR terus molor barhari-hari. Ini semua, nilainya, akibat praktik politik kotor. “Usulan ketuanya dari DPD, kemudian wakil 1 PDI Perjuangan, wakil 2 Golkar, sesuai urutan pemenang Pemilu. Artinya, saya nyatakan politik di Republik ini sudah kotor.” (mh)  
foto:ry/parle/iw

## Puan Harapkan Tidak Ada Tirani Mayoritas di MPR

Puan Maharani Anggota MPR/DPR RI dari F-PDI Perjuangan berharap agar tirani mayoritas yang terjadi di DPR RI tak terjadi di lembaga MPR RI. Ini adalah lembaga yang mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan mufakat.

Komentar Puan tersebut disampaikan kepada pers terkait agenda pemilihan pimpinan MPR RI. “Kami mengedepankan asas musyawarah mufakat sesuai dengan Pancasila. Kami berkeinginan jangan lagi kita ke depan terjadi tirani mayoritas, kemudian mendikte minoritas,” katanya



Puan Maharani Anggota MPR/DPR RI

sebelum mengikuti Rapat Paripurna MPR, Selasa (7/10).

Terkait usulan paket pimpinan MPR, Koalisi Indonesia Hebat mengusulkan dua calon dari PKB dan PDI Perjuangan sendiri. Selain itu, ada calon dari PPP yang juga diusulkan. Sekarang tinggal menunggu konsistensi dari PPP. “Mudah-mudahan teman-teman di PPP sudah dapat pencerahan, mana yang bisa diajak berteman dengan hati. Sejak awal kita di PDI Perjuangan dan Pak Jokowi selalu berharap PPP dapat bersama kami ikut membangun bangsa ini ke depan,” ungkap Puan.

Sementara ketika ditanya soal kemungkinan terjadi voting dalam pemilihan paket pimpinan MPR, Puan sekali lagi berharap, agar itu dihindari. Musyawarah sesuai Pancasila harus tetap dijunjung tinggi. “Kalau voting, berarti suara kami tidak didengar.

Jangan bawa tirani mayoritas yang terjadi di DPR ke MPR. Di sini tempat para negarawan yang bisa mengayomi bangsa ini,” tandasnya lebih lanjut.

Karena unsur pimpinan MPR harus juga mengusung calon dari DPD, man-

tan Anggota Komisi I DPR periode lalu itu, menghimbau agar DPD bisa ikut bergabung dengan koalisi Indonesia Hebat. “Kami berkeinginan DPD pun bisa menjadi mitra kerja sama Indonesia Hebat,” harapnya. (mh)/foto: iwan armanias/parle/iw.

## Ketua DPR Janji Buka Akses Informasi Parlemen

Ketua DPR RI Setya Novanto berjanji akan membuka akses informasi seputar kegiatan parlemen seluas-luasnya kepada masyarakat dan media massa. Hal itu ia sampaikan saat meninjau Press Room DPR-RI, Gedung Nusantara III, Selasa (7/10).

“Nanti akan kita buat counter desk untuk menampung aspirasi masyarakat, apakah itu menyangkut kinerja, keluhan-keluhan dari masyarakat. Semua akan kita evaluasi,” kata Setya kepada para awak media yang kebetulan sedang berada di Press Room.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, semua informasi yang ada di Parlemen, akan diberikan kepada masyarakat. Mengingat, saat ini merupakan era keterbukaan, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi.

“Semua informasi, kita berikan kepada masyarakat seluas-luasnya. Informasi itu akan diberikan secara online,” imbuh Setya.

Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur ini juga akan memperbaiki sa-



Ketua DPR RI Setya Novanto berdialog dengan wartawan

rana dan prasarana di Kompleks Parlemen, guna mendukung tugas dan fungsi parlemen.

“Setelah saya lihat, perlu ada perbaikan-perbaikan yang ada di DPR-RI secara sederhana, murah dan efisien,” tambah Setya.

Ia juga sempat mengucapkan terima kasih kepada awak media yang telah memberikan berbagai masukan, dan memohon doa agar ia diberi kelancaran menjabat sebagai Ketua DPR. (sf)/foto: iwan armanias/parle/iw.

## Hujan Interupsi dan Memanas Warnai Sidang Paripurna MPR

Rapat Paripurna MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara Maimanah Umar dari DPD didampingi anggota DPR dari Fraksi Gerindra Ade Rezki Pratama yang beragendakan pemilihan Pimpinan MPR periode 2014-2019, Selasa (7/10) yang diprediksi lancar ternyata diujani interupsi.

Penundaan jadwal Sidang selama

sehari untuk memberikan kesempatan kepada DPD ternyata belum cukup sehingga suasana sidang tetap berlangsung panas, sebagaimana Sidang Paripurna DPR saat pemilihan pimpinan yang diwarnai interupsi dan walk out Kamis dini hari lalu.

Suasana panas diawali ketika anggota Fraksi PKS Refrizal memprotes

DPD yang sudah menentukan Oesman Sapta sebagai calon Pimpinan MPR. “Kami tidak pernah menugaskan DPD untuk memilih satu nama calon pimpinan, seharusnya dibicarakan di Rapat Paripurna MPR,” tegas dia.

Pernyataan keras FPKS ini diperkuat Fraksi Gerindra bahwa pemilihan Oesman Sapta tidak disetujui oleh semua



Suasana Sidang Paripurna MPR

anggota DPD. “DPD tidak kompak untuk satu memutuskan calon Pimpinan MPR satu orang. Forum paripurna tertinggi seharusnya ada di MPR. Seperti kata PDI-P, forum paripurna lah yang kita pegang. Bukan yang lain,” ujar anggota F Gerindra Desmond Mahesa.

Kata-kata Desmon itu memantik reaksi dari anggota DPD. Sejumlah anggota DPD langsung berdiri ingin memprotes pernyataan Desmon.

Pernyataan Desmon juga menyulut kemarahan sejumlah kader PDI Per-

juangan. Antara lain ia mengatakan, “PDI P bisa dipegang mulutnya”. Anggota MPR dari Fraksi PDIP Budiman Sudjatmiko, dan Aria Bima menunjuk-nunjuk ke arah Desmon. Bahkan anggota fraksi PDIP Utut Adianto sampai menggebrak meja dan menunjuk ke arah Desmon.

Interupsi anggota yang lain meminta Pimpinan Sidang untuk melakukan skors dulu guna menyamakan persepsi terkait masih banyaknya perbedaan pendapat sebelum pada inti acara pemilihan Pimpinan MPR. Sebagian meminta dilakukan skors untuk loby antara Pimpinan Sidang, perwakilan Fraksi-fraksi dan kelompok DPD dan akhirnya disetujui peserta sidang.

Para anggota Majelis ini sepatutnya untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam rangka menjaga marwah dan kewibawaan lembaga tinggi negara. “Apalagi sidang ini diliput media dan diikuti serta disaksikan oleh segenap rakyat Indonesia,” kata anggota MPR dari Fraksi PAN. (mp)/  
foto:iwan armanias/parle/iw.

## TNI Sudah Menjadi Kekuatan yang Disegani

Perkembangan pesat TNI dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi sumber daya manusia maupun alutsista patut mendapat apresiasi. Sejumlah fakta dan data menunjukkan TNI sebagai alat pertahanan bangsa, penjaga kedaulatan NKRI sudah menjadi kekuatan yang disegani di kawasan ini.

“Saya memberikan apresiasi dalam beberapa tahun terakhir di bawah kepemimpinan SBY banyak sekali kemajuan khususnya dalam melengkapi alutsista TNI. Saya rasa Insha Allah TNI sudah menjadi kekuatan yang disegani di kawasan ini,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PPP Andi Ghalib di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/14).

Wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II ini menyampaikan harapan pemerintahan Presiden Jokowi yang akan segera dilantik dapat melanjutkan prestasi ini, bahkan lebih baik. Mantan Oditur Jenderal ABRI ini berjanji akan mengawal proses itu dalam tugasnya di DPR lima



Suasana apel TNI

tahun yang akan datang.

“Semoga TNI tetap jaya dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Saya berharap akan bertugas di Komisi I nantinya sehingga dapat mengawal

kemajuan TNI ke depan, apalagi saya punya pengalaman di bidang pertahanan dan luar negeri,” tutur Andi Ghalib yang juga pernah menjabat Duta Besar di India.

Dalam Peringatan HUT TNI yang ke-69 hari ini sejumlah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dipamerkan kepada masyarakat diantaranya, tank Leopard, meriam 155 milimeter Caesar, 35 KRI, 12 Sukhoi Su27/30 Flanker, sepuluh F-16 Fighting Falcon dan 12 Hawk 109/209.

Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya mengatakan peringatan tahun ini juga melibatkan ribuan prajurit dari tiga angkatan. “Ini perayaan HUT TNI terbesar dalam sejarah bangsa,” tuturnya.

Catatan prestasi lain yang diraih TNI tahun ini adalah menjadi juara umum

kejuaraan menembak AASAM 2014. Dengan menggunakan senjata buatan PT Pindad, prajurit TNI mengalahkan pesaingnya, tentara dari 15 negara diantaranya Inggris, Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru dan Singapura. (iky) foto: rizka/parle/iw

## Ketua DPR : Jadikan Kurban Sebagai Tradisi



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon saat penyerahan hewan kurban

Ketua DPR RI Setya Novanto mengharapkan berkorban setiap tahun pada hari Raya Idul Adha agar dijadikan tradisi besar di lingkungan DPR. Demikian disampaikan usai Shalat Idul Adha, Minggu (5/10) di halaman Masjid Baiturrahman, Senayan, Jakarta.

Setya Novanto yang didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti dan beberapa pejabat Setjen DPR mengatakan, ini kesempatan pertama sebagai pimpinan DPR RI bisa berkumpul bersama-sama dengan masyarakat melaksanakan kurban.

“Saya bersyukur semoga masyarakat dapat ikut menikmati daging kurban,” kata Setya Novanto yang pagi itu langsung menyaksikan pemotongan hewan kurban di lingkungan DPR RI.

Novanto berharap tahun depan, jumlah hewan kurban semakin meningkat dan semakin bertambah partisipasi dari seluruh anggota Dewan.

Pada Idul Adha kali ini, Setya berkorban satu ekor sapi dengan berat kurang lebih 400 kg. Selain Novanto, Pimpinan lain yang ikut berkorban adalah mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto, mantan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, dan Ketua DPD Irman Gusman.

“Ini kita buat tradisi besar dan terus dilakukan di DPR, ini perintah Allah, dan semua pimpinan dan anggota DPR RI bisa melaksanakan dan bergabung dengan saudara kita, hal ini agar bisa ditindaklanjuti,” kata Novanto.

Bagi Novanto, ini adalah kurban per-

tama sebagai pimpinan DPR RI meskipun ia pernah melakukannya di daerah pemilihannya.

“Ini buat saya secara pribadi adalah pertama. Kesempatan inilah tradisi dan kita teruskan dan meriahkan, sehingga bisa dinikmati rakyat. Kita harapkan anggota DPR RI untuk berkorban di DPR karena DPR RI adalah milik rakyat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengatakan, kurban merupakan bentuk dari solidaritas dan untuk kepentingan rakyat. Saya kira ini adalah bentuk kepedulian kepada rakyat.

Kami akan bekerja keras agar menjadi lembaga yang mewakili representasi rakyat. Dan kurban merupakan langkah awal dan juga simbol untuk kerja yang lebih baik,” katanya. Apalagi jika kita lihat masih banyak masyarakat kita yang kurang beruntung.

Pada kesempatan itu, Setya Novanto menyerahkan hewan kurban kepada Sekjen DPR Winantuningtyastiti untuk dapat diteruskan kepada masyarakat.

Sekjen DPR mengatakan, total hewan kurban tahun ini adalah 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Sekjen juga berharap tahun depan jumlah yang berpartisipasi untuk berkorban akan semakin banyak lagi. Dan Sekjen juga menyampaikan bahwa anggota Dewan banyak yang berkorban di dipilanya masing-masing. “Kami akan evaluasi agar ke depan lebih meriah lagi,” kata Win. (tt)/foto:naefurodji/parle/iw.



# DPR Siap Bahas Perppu Pilkada



Anggota DPR Benny K. Harman (kiri) ditengah suasana sidang

DPR RI siap membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang telah diterbitkan pemerintah Presiden Soesilo Bambang Yudoyono. Namun diterima atau tidak Perppu yang dimaksudkan mengganti UU Pilkada dan UU Pemda ini tergantung sikap resmi fraksi dalam persidangan.

“DPR siap membahasnya dan Fraksi Demokrat akan mengawal ini karena apa yang kita perjuangkan selama ini ada dalam Perppu tersebut. Kita tidak menjamin fraksi lain sependapat tapi

kita dalam posisi mengimbuva mereka mendukung ini,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/14).

Ia menambahkan ada dua syarat penting yang harus dipenuhi sehingga pemerintah menerbitkan Perppu yaitu kepentingan memaksa dan adanya invase hukum atau kekosongan hukum. Kepentingan itu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan suara rakyat dari ancaman UU Pilkada yang

baru disahkan.

“Ada ancaman nyata terhadap daulat rakyat. Presiden sesuai konstitusi tidak boleh membiarkan ancaman ini menjadi nyata. Dengan Perppu ini presiden ingin melindungi demokrasi dari ancaman pemberlakuan UU Pilkada. Tidak boleh presiden membiarkan demokrasi mati sebab presiden sumpahnya adalah menjunjung tinggi konstitusi,” tekannya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan dua Perppu yaitu Perppu no.1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Perppu no. 2/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini menurutnya sebagai bentuk perjuangan bersama Rakyat Indonesia untuk tetap mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung dengan perbaikan mendasar.

Setelah Perppu diterbitkan, pemerintah akan mengajukannya kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 30 hari. Apabila diterima, maka secara otomatis UU Pilkada berubah sesuai Perppu. Kalau DPR menolak maka Perppu dianggap gugur dan UU Pilkada tetap berlaku. (iky) foto: iwan armanias/parole/iw

## Guruh Akan Tetap Kawal Pemerintah Mendatang

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Guruh Soekarno Putra mengaku akan terus konsisten menjaga dan mengawal kebijakan yang akan disusun oleh pemerintahan mendatang. Meski ia kini berada dalam partai pengusung Presiden terpilih.

“Sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, yang terpenting adalah menjalankan amanah rakyat demi bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan demi Pemerintahan atau Presiden. Dengan demikian saya akan terus

menjaga dan mengawal pemerintahan Jokowi meski merupakan Presiden dari Partai saya sendiri, PDI Perjuangan,” jelas Guruh sesaat sebelum berlangsungnya sidang paripurna, Rabu (1/10) malam.

Guruh menjelaskan sebagai anggota legislatif yang berasal dari PDI Perjuangan pihaknya akan selalu mensupport kebijakan - kebijakan pemerintahan mendatang dari dalam legislatif. Meski demikian sebagai wakil rakyat ia tetap akan menjaga dan mengawal jika kelak



Anggota F-PDI Perjuangan Guruh Soekarno Putra

di tengah perjalanan ada sebuah kebijakan yang kurang bijak atau tidak pro rakyat. Karena untuk membangun

bangsa adalah dengan mengutamakan kepentingan rakyat dibanding kepentingan apapun, termasuk partai dan

golongan. (Ayu) foto: naefuroji/parle/hr

## DPR Tak Boleh Khianati Amanat dan Kepercayaan Rakyat



Penyerahan palu dari Pimpinan Sementara Popong Otje Djundjungan kepada Ketua DPR baru Setya Novanto

Pimpinan DPR telah disahkan pada Rapat Paripurna, Kamis (2/10) dini hari, di Gedung Nusantara II. Walaupun berjalan cukup alot dan sempat terjadi *walk out* dari beberapa fraksi, akhirnya Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar terpilih menjadi Ketua DPR periode 2014-2019. Dalam kesempatan pidato pertamanya, Setya mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh Anggota Dewan yang telah memilih dirinya beserta keempat-wakil Ketua DPR.

“Sebagai wakil rakyat terpilih, Insha Allah kita akan menjalankan tugas untuk kurun waktu lima tahun mendatang sejak tanggal 2 Oktober 2014 hingga 30 September 2019. Kami sebagai Ketua dan Wakil-wakil Ketua akan menjalankan kewajiban dan akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan berdemokrasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, daripada kepentingan pribadi, seseorang dan

golongan,” kata Setya.

Ia menyatakan, Pimpinan DPR juga bersumpah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang pada hakikatnya adalah investasi dari ikrar 560 Anggota Dewan untuk berjuang, mengartikulasikan dan mengagresikan segala kepentingan rakyat secara keseluruhan, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi dewan, baik di legislasi, pengawasan maupun anggaran.

“Kita datang dari berbagai partai politik, dan kita telah berkompetisi dalam pemilu lalu. Namun sejatinya, kita semua adalah satu dalam konteks mengemban amanat rakyat yang telah memberikan suaranya pada pemilu lalu. Kita adalah wakil-wakil rakyat yang legitimasi, oleh karena itu, kita tidak boleh mengkhianati amanat dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Tanpa partisipasi rakyat dalam Pemilu yang lalu, mustahil kita akan

menjadi Anggota DPR-RI,” imbuh Setya.

Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur ini menyadari bahwa tugas sebagai Pimpinan Dewan sangatlah berat, namun di satu sisi juga sangat mulia. Memimpin lembaga perwakilan rakyat, tambah Setya, merupakan posisi strategis dalam mengarahkan pelaksanaan peran, tugas, fungsi dan wewenang DPR untuk lima tahun kedepan.

“Walaupun pimpinan bukan merupakan atasan bagi Anggota DPR, namun kami harus menjaga agar lembaga kita ini menjadi lembaga yang mendapatkan kepercayaan rakyat untuk mengemban fungsi-fungsi konstitusional, menjaga agar proses demokrasi tetap berjalan, sesuai rambu-rambu konstitusi. Oleh karena itu, perkenankanlah kami memohon dukungan, kritik yang konstruktif serta doa agar kami senantiasa mendapat kekuatan dalam menjalankan amanat ini,” pinta Setya.

Berkaca dari perjalanan demokrasi yang dimulai pada 1998, dimana telah melewati satu dasawarsa, tentunya dengan segala pahit getirnya tentunya menghasilkan pengalaman yang sangat berharga bagi kehidupan bangsa dan negara.

“Berbagai usaha dan tekad reformasi khususnya di bidang politik telah kita coba, laksanakan melalui berbagai langkah nyata, baik pemilu yang berlangsung secara periodik, dan luber jurdil, maupun berbagai langkah yang dilakukan. MPR dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, sesuai amanat konstitusi UU 1945 terutama pasca amandemen dan DPR pasca reformasi, telah berupaya melakukan konsolidasi demokrasi, meskipun disadari bahwa kurun satu dasawarsa adalah masa transisi, yang tidak mu-

dah dilewati,” jelas Setya.

Oleh karena itu, tambah Setya, ini menjadi momen DPR periode 2014-2019 untuk melanjutkan konsolidasi demokrasi yang sudah berjalan di rel yang benar, karena periode lima tahun ke depan merupakan periode pe-

mentapan demokrasi sebagai sebuah sistem yang kita pilih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Oleh karena itu, menjadi tugas yang tak ringan bagi Anggota DPR periode ini untuk melanjutkan sekaligus menetapkan pelaksanaan mekanisme

*check and balances* antara DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, dengan presiden sebagai kepala pemerintahan, yang keduanya dipilih melalui pelaksanaan pemilihan umum dalam sebuah pola hubungan yang setara, menghormati dan menghargai,” jelasnya. (sf)/foto:andri/parle/iw.

## Banyak yang Salah Kaprah



Suasana Sidang Paripurna DPR RI

Anggota DPR RI yang sekaligus sebagai putra Proklamator, Guruh Soekarno Putra mengatakan telah banyak salah kaprah yang terjadi di negeri ini. Salah satu hal utama yang menurutnya salah adalah konstitusi negeri ini. Tepatnya UUD 1945 yang pada tahun 2002 sudah diamandemen sebanyak 4 kali.

“Itu sudah kebablasan, dan menurut saya sudah menyimpang dari Pancasila. Namanya saja UUD 45, mukadimahnya masih tetap, tapi batang tubuhnya sudah berubah menjadi sebuah konstitusi liberal. Itu harus dikembalikan, harus diamandemen lagi, bagaimana caranya harus kembali ke UUD 45 yang asli yang merupakan hasil atau produk proklamasi, atau hasil produk dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959,” ungkap Guruh.

MPR RI misalnya, dijelaskan Guruh, sebelumnya merupakan lembaga tertinggi Negara. Kini sudah tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara, melainkan satu level atau sejajar dengan lembaga lainnya, seperti DPR RI. Presiden dalam UUD saat ini dinilai Guruh hanya menjalankan visi dan misi masing-masing. Sementara dalam UUD 1945 yang merupakan hasil proklamasi, Presiden menjalankan GBHN (Garis Besar Haluan Negara) yang dibuat oleh MPR sebagai pengejawantahan kedaulatan rakyat.

“Yang paling buruk adalah dengan terjadinya pemilu langsung. Buat orang yang tidak mengerti politik digembargembarkan juga bahwa seakan-akan pemilu langsung itu paling demokratis dan suatu kemajuan. Itu orang yang tidak mengerti politik, seolah rakyat diberikan haknya langsung, tapi kalau orang mengerti politik dan sejarah, mengerti Pancasila. Justru pemilu langsung itu bertentangan dengan Pancasila, sila ke empat yang bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” paparnya.

Dengan demikian dijelaskan Guruh, yang namanya demokrasi itu adalah demokrasi Pancasila, demokrasi yang dipimpin, sekaligus demokrasi yang menganut sistem perwakilan karena ada kalimat permusyawaratan perwakilan. Sehingga disini dijunjung musyawarah untuk mufakat, bukan gaya liberalis yang sedikit-sedikit voting.

“Pilkada yang sekarang sedang diributkan ini, dalam sistem UUD 1945 yang asli atau belum diamandemen, tidak ada soal Pilkada di dalamnya. Presidenlah yang langsung memilih Gubernur. Presiden menunjuk langsung orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin daerahnya, contohnya ketika Soekarno menunjuk Ali Sadikin untuk memimpin DKI Jakarta. Jika presiden tidak menemukan figur yang cocok maka presiden bisa bertanya kepada DPRD,” tegas Guruh. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Popong Tak Gentar Pimpin Sidang di Usia Tua

Menginjak usia ke-76, Anggota DPR-RI Popong Otje Djundjunan kembali dipercaya untuk mewakili aspirasi masyarakat daerah pemilihan Jawa Barat I untuk menjadi wakil rakyat di Senayan. Periode 2014-2019 ini adalah kali kelima Popong menjabat sebagai Anggota DPR.

Politisi Partai Golkar ini dipercaya untuk menjadi Pimpinan DPR sementara, dan memimpin Pelantikan Anggota DPR Periode 2014-2019, dilanjutkan ke Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR. Selama acara, Popong didampingi Anggota DPR termuda, yaitu Ade Rezki Pratama.



Pimpinan DPR sementara Popong Otje Djundjuna

Walaupun sudah menjadi Wakil Rakyat cukup lama, namun untuk memimpin Rapat Paripurna baru kali ini dilakoninya. Tentunya, pengalaman selama menjadi Anggota Dewan diuji. Walaupun baru pertama kali, tak nampak grogi di raut mukanya. Malah, dia tampak sangat percaya diri dan bersemangat.

“Sudah biasa memimpin rapat atuh. Ya walaupun cukup berat, tapi ini resiko terjun di dunia politik,” kata Popong dengan ciri khas logat Sunda-nya, saat ditemui usai memimpin Rapat Paripurna Pemilihan Pimpinan DPR, di Gedung Nusantara II, Kamis (2/10) dini hari.

Dari pantauan Parle selama rapat, tampak sesekali Popong kewalahan menghadapi situasi rapat yang sedikit kurang kondusif. Hujaman interupsi terus dilancarkan oleh beberapa anggota fraksi di DPR. Bahkan, sesekali tampak Anggota Dewan merangsek naik ke mimbar, namun dia tidak gentar. Bahkan ia berusaha menegur Anggota Dewan yang terus berdiri di depan mimbar.

“Silahkan duduk dulu. Kalau tidak mau duduk, saya tidak mau mencabut skors,” tegas Popong. Teguran ini bukan hanya sekali dua kali, bahkan sampai beberapa kali.

Hingga pada suasana semakin memanas, ketika dia ingin mengetok menggunakan palu, ternyata palu sudah tidak berada di tempatnya. Sepertinya ada yang ‘iseng’ mengambil. Namun tak lama kemudian, palu itu telah kembali ke tempatnya semula.

Catatan Parle, ada ciri khas yang ditunjukkan oleh seorang Popong. Dengan logat khas Sunda, mungkin ini cukup asing bagi sebagian orang. Namun, ini lah Popong dengan ciri khasnya. Hal lain adalah soal ketahanan fisiknya. Bahkan, sampai pukul 4.30 dini hari, dia tetap semangat memimpin rapat. Padahal, sehari sebelumnya dia sudah memimpin rapat sehari.

Mungkin, hal ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Karena semangat menjadi Anggota Dewan tak mengenal umur, baik muda maupun tua. (sf)/foto:naeforudji/parle/iw.

## Pimpinan DPR Harapkan Alat Kelengkapan Dewan Segera Terbentuk

Wakil Ketua DPR Fadli Zon berharap Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR segera terbentuk. Sehingga, Anggota Dewan periode 2014-2019 segera memulai kinerjanya. Apalagi, Pimpinan DPR juga sudah disahkan.

“Kami ingin cepat terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan yang didalamnya terdapat Komisi-komisi, sehingga kawan-kawan Anggota Dewan ini bisa langsung bekerja,” kata Fadli ketika ditemui usai menerima pengaduan dari sejumlah tokoh masyarakat, di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kamis (9/10/2014).

Politisi Gerindra ini menambahkan, jika pembentukan AKD harus menunggu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang direncanakan pada 20 Oktober mendatang, dirasa terlalu



Pimpinan DPR Fadli Zon dan Agus Hermanto usai menerima pengaduan dari sejumlah tokoh masyarakat

lama. Mengingat, dengan dilantiknya Presiden dan Wapres, bukan berarti Kabinet langsung otomatis terbentuk.

“Kalau menunggu pembentukan Kabinet baru, sedangkan (Presiden dan Wapres) dilantik masih 20 Oktober besok, itu terlalu lama. Jadi kita berharap, rancangan kita mengenai AKD segera dipercepat,” imbuh Fadli.

Terkait dengan wacana pemekaran Komisi, Politisi asal Dapil Jawa Barat V ini menyatakan, hal ini belum mungkin terjadi. Pemekaran ini memerlukan proses pengkajian. Pasalnya, jika sampai Komisi ditambah, atau jumlahnya melebihi saat ini yang berjumlah 11 Komisi, maka akan berdampak pada anggaran dan tempat.

“Kalau pemekaran Komisi masih wacana, bisa iya, bisa tidak. Usulan ini datang dari Anggota Dewan sendiri. Hal ini memang perlu dikaji, karena akan ada konsekuensi anggaran maupun tempat yang mesti ditambah. Apakah ini memungkinkan atau tidak,” tambah Fadli.

Fadli mengaku, wacana ini muncul dari Anggota Dewan yang menilai tidak produktifnya kinerja dari beberapa komisi. Yakni, ada beberapa Komisi yang memiliki mitra kerja terlalu banyak, sehingga tidak mampu meladeni semua mitra kerjanya. Namun di satu sisi, ada Komisi yang jumlah mitra kerjanya terlalu sedikit.

“Yang mitra kerjanya sedikit ini, sa-

ngat produktif. Namun yang mitra kerjanya banyak, agak kedodoran. Karena mereka tidak mampu meladeni semua. Tapi ini kami terima sebagai bahan kajian wacana, yang harus kita diskusikan dahulu, terutama konsekuensi masalah ruangnya, anggaran dan seterusnya. Kalau ini diperlukan, ya kenapa tidak. Kita tambah komisinya. Tapi kalau merasa sudah cukup, ya tidak perlu,” ujar Fadli.

Terlepas dari wacana pemekaran Komisi, Fadli bersama Pimpinan DPR lain berharap pembentukan AKD ini segera dipercepat, sehingga Anggota Dewan dapat segera memulai kerjanya. (sf) foto: andri/parle/iw

## Ketua DPR Harapkan Pemerintahan Jokowi Berhasil Angkat Perekonomian

Ketua DPR mengaku terus terang belum pernah mendengar apa yang disampaikan Hashim Djojohadikusumo bahwa akan menjegal pemerintahan Jokowi. “Saya rasa dalam rapat-rapat, Pak Hashim mengharapkan Koalisi Merah Putih (KMP) tetap bersinergi supaya pemerintahan berjalan baik,” ungkap Ketua DPR Setya Novanto di Jakarta, Kamis (9/10).

Bahkan Pimpinan DPR, ujar Setya, mengharapkan Pemerintahan dibawah Jokowi berhasil mengangkat perekonomian kita. “Saya kira itu pendapat pribadi Pak Hashim. Kita jangan gegabah karena kita belum komunikasi. Mudah-mudahan maksudnya bukan demikian,” tukas Setya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo melontarkan pernyataan kontroversial terkait keinginannya untuk menghambat Presiden Terpilih Jokowi. Banyak yang menyangkan keinginan adik Prabowo Subianto itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan koalisi yang dibangun partainya bertujuan untuk menjadi oposisi yang konstruktif. Jika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah



Ketua DPR Setya Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon

pro rakyat, KMP berkomitmen untuk memberikan dukungan. “Kalau kebijakan pro rakyat pasti kami dukung. Namun kalau ada yang liberal tentu kita harus hadapi” katanya.

Sementara itu Ketua DPR yang ditanya soal pemekaran Komisi-komisi mengatakan, pemekaran dimaksudkan sebagai produktivitas. Sebab ada Komisi yang memiliki 7 mitra, bahkan ada

yang sampai 14 mitra. Komisi III juga banyak mitra kerjanya, dan memang kita inginkan bagaimana produktivitas komisi bisa menyelesaikan agendanya tepat waktu. Di sisi lain mitra kerja (pemerintah) tidak merasa kelelahan dan tidak tertampung. “Betul-betul kita mau produktivitas berjalan dengan baik,” ia menjelaskan.

Saat ditanyakan, kalau ditawarkan Men-

teri oleh Jokowi, Setya mengemukakan, Koalisi Merah Putih tidak berpikir untuk duduk di Kabinet. Dijelaskan, kita bersyukur bisa menyelesaikan

agenda-agenda pemilihan Pimpinan DPR, Pimpinan MPR berjalan demokratis. “Kita tidak pernah berpikiran jabatan menteri di Kabinet Jokowi.”

tegasnya. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

## Penambahan Komisi Langkah Efisiensi dan Efektifitas



Anggota DPR Edhie Prabowo

Penambahan komisi di DPR RI seperti yang menjadi wacana beberapa hari belakangan menurut Edhie Prabowo, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra merupakan sebuah langkah efisiensi dan efektifitas dalam bekerja.

“Menurut saya adanya rencana penambahan komisi di DPR sangat baik, itu semata agar setiap komisi dan anggota dapat lebih fokus lagi menjalankan tugas dan fungsinya,” ungkap Edhie Prabowo usai Sidang Paripurna DPR RI, Kamis (9/10).

Dijelaskannya, selama ini satu komisi memiliki mitra kerja yang sangat banyak, bahkan ada yang mencapai 16 mitra kerja. Hal tersebut mengakibatkan komisi tersebut menjadi kurang fokus dalam membahas program-program serta pengawasan yang berkaitan dengan mitra kerjanya tersebut.

“Komisi I misalnya ada 16 mitra kerja, Komisi VI ada 4 kementerian dan lembaga serta badan. Dalam waktu masa sidang 3 bulan, kira-kira apa cukup waktu untuk membahas semua mitra kerja tersebut. Tentu pemba-

hasan yang dimaksud tidak sekedar bicara saja, tapi lebih mendetail. Saya rasa tidak cukup waktu untuk semua itu. Oleh karenanya sudah selanjutnya ada penambahan komisi di DPR nanti,” paparnya.

Edhie menampik anggapan penambahan komisi itu menjadi sebuah langkah pemborosan. Pasalnya, penambahan komisi tidak berarti ada perekrutan SDM (sumber daya manusia) baru. Jumlah anggota DPR tetap sama, staf komisi pun bisa diambil dari pegawai di lingkungan Kesetjenan. Sehingga anggapan pemborosan menurutnya tidak mendasar. Meski demikian Edhie menyerahkan sepenuhnya keputusan penambahan komisi serta lingkup dan mitra kerja masing-masing komisi kepada keputusan bersama fraksi-fraksi. (Ayu)/foto:andri/parle/iw.

## Program Pro Rakyat Harus Didukung



Wakil Ketua DPR Fadli Zon

Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang menyatakan akan menjegal pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo tak pelak cukup mendapat perhatian dari seluruh pihak. Termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon, yang berlatar belakang partai yang sama dengan Hashim.

“Saya klarifikasi, bahwa yang dimaksud itu jika ada program-program yang mengganggu kepentingan nasi-

onal dan rakyat, tentu perlu kita koreksi. Itu yang dimaksud dihambat,” kata Fadli, saat ditemui usai menerima aspirasi dari sejumlah tokoh masyarakat di Gedung Nusantara III, Kamis (9/10/2014).

Tapi, tambah Fadli, jika program itu pro rakyat, dan menguntungkan kepentingan rakyat dan nasional, tidak ada alasan untuk tidak mendukung program-program tersebut.

“Pasti program itu harus kita dukung. Walaupun program itu datang dari pemerintah yang secara politik berbeda dengan kita (Koalisi Merah Putih), pasti kita dukung. Tidak mungkin kita menghambat,” imbuh Fadli.

Politisi dari Dapil Jawa Barat V ini menyatakan, di era Demokrasi saat ini, setiap orang bebas untuk mengeluarkan pendapat, namun tetap bertanggung jawab. Dan setiap orang tidak boleh memaksa untuk memiliki pendapat yang sama dengan dirinya.

“Dalam wacana, setiap orang bebas, kita tidak boleh membuat orang sama berpendapat dengan kita. Pernyataan Pak Hashim itu sah-sah saja, tetapi bukan pernyataan resmi dari KMP,” tutup Fadli. (sf) foto: andri/parle/iw

# Zulkifli Hasan Ketua MPR Baru



Pimpinan MPR terpilih periode 2014–2019

Setelah melalui proses voting yang melelahkan, akhirnya politisi PAN Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua MPR RI yang baru periode 2014-2019. Ia terpilih lewat Paket B yang diusung 5 fraksi dengan 347 suara. Sedangkan Oesman Sapta Odang meraih 330 suara lewat Paket A yang diusulkan 5 fraksi dan 1 Kelompok DPD.

Proses voting yang diambil melalui pemungutan suara tertutup itu dimulai sekitar pukul 03.00 WIB dini hari pada Rabu (8/10) dan baru selesai pada pukul 05.30 WIB. Pimpinan MPR baru dalam formasi Paket B langsung dilantik sebagai Pimpinan MPR oleh Ketua MA untuk kemudian diambil sumpahnya.

Seperi diketahui Paket B yang kini

menjadi Pimpinan MPR terdiri dari Zulkifli Hasan sebagai Ketua, Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Mahyudin (F-PG), EE. Mangindaan (F-PD), dan Oesman Sapta Odang (DPD) masing-masing sebagai Wakil Ketua. Mereka secara resmi diusung oleh F. Gerindra, F-PG, F-PD, dan F-PKS.

Pemilihan suara untuk Pimpinan MPR hanya menyisakan 1 suara abstain. Sebelumnya saat menyampaikan visi misi sebagai Ketua MPR, Zulkifli mengutarakan, akan menciptakan keharmonisan antara DPR dan DPD, selain juga tetap mengawal 4 pilar yang selama ini terus disosialisasikan oleh MPR.

Kepada pers usai pelantikan, Zulkifli menyatakan, akan segera menyuk-

seskan pelantikan Presiden Terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden Terpilih Jusuf Kalla pada 20 Oktober nanti. “Agenda terdekat kita tanggal 20 mendatang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, harus betul-betul kita sukseskan karena jadi tonggak keberhasilan demokrasi kita,” ucapnya.

Usai pemilihan dan pelantikan, Zulkifli mendapat ucapan selamat dari teman-teman satu koalisinya di Koalisi Merah Putih maupun koalisi yang bersebrangan yaitu Koalisi Indonesia Hebat. Pesta demokrasi di parlemen sudah usai setelah DPR, DPD, dan terakhir MPR telah memiliki pimpinan baru masing-masing. Saling menghargai atas hasil pemilihan Pimpinan MPR sangat terasa di ruang Paripurna. (mh)/  
foto:andri/parole/iw.



Ketua DPR RI Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat memasukkan surat suara dalam Pemilihan Pimpinan MPR Periode 2014-2019, Rabu (8/10) Foto: Iwan Armanias/Parle/Iw.



Pimpinan MPR Terpilih menerima palu dari Pimpinan Sementara MPR RI dan ucapan selamat kepada Pimpinan MPR baru, Rabu (8/10) Foto: Iwan Armanias/Parle/Iw.



Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan (kiri) dan Fadli Zon (kanan) memberi ucapan selamat kepada Pimpinan MPR baru, Rabu (8/10) Foto: Iwan Armanias/Parle/Iw.